



Buruh Migran Sasak: Integrasi Budaya, Perbudakan, Konflik Sosial dan Kehidupan Keluarga di Rumah Selama di Tanah Rantau

Saipul Hamdi¹, Hafizah Awalia², Arif Nasrullah³

Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kehidupan buruh migran Sasak yang pernah bekerja di Malaysia. Kehidupan mereka penuh dengan drama dan masalah sosial mulai dari berangkat ke Malaysia, bekerja di tempat perusahaan dan ketika mereka pulang. Salah satu persoalan besar adalah perbedaan budaya dengan masyarakat lokal. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menguji integrasi budaya yang dilakukan oleh buruh migran Sasak dengan masyarakat lokal. TKI di Malaysia juga mengalami perbudakan, ketika bertemu orang di Malaysia mereka akan dijual ke perusahaan dan uang itu diambil oleh calo di sana yang berdampak pada gaji mereka. Penelitian juga akan menginvestigasi pola perbudakan yang terjadi dan dampaknya terhadap konflik sosial antara TKI dengan calo dan perusahaan. Selain itu, penelitian juga akan mengeksplorasi kehidupan keluarga terutama istri dan anak-anak TKI yang ditinggal di rumah. Banyak istri yang menikah lagi meninggalkan suaminya karena tidak mendapat kabar dalam waktu yang lama atas keberadaan suaminya. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan di jurnal terakreditasi Sinta 2 dan buku referensi. Penelitian ini akan dilakukan selama 7 bulan, 3 bulan pengambilan data di lapangan, dan 4 bulan untuk penulisan laporan dan luaran berupa artikel.

Kata Kunci: Buruh Migran, Integrasi Budaya, Perbudakan, Konflik Sosial, Sasak

¹ shmandi@unram.ac.id

Pendahuluan

Pilihan sebagai buruh migran berarti memilih hidup di tempat yang serba baru baik dari segi bahasa, budaya, makanan dan hukum. Hidup di negara orang lain membutuhkan adaptasi baru mulai dari penguasaan bahasa, budaya dan juga penguasaan undang-undang negara. Para buruh migran seharusnya menguasai unsur-unsur tersebut sebelum berangkat ke tempat bekerja yang baru sehingga tidak akan menghadapi persoalan berat. Namun kenyataannya sebagian dari mereka tidak mau belajar dan nekat untuk berangkat tanpa dibekali dengan pengetahuan dan skill yang cukup. Mereka tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar tentang itu karena faktor lingkungan yang lemah dalam tradisi membacadan menulis. Kondisi ini yang menyebabkan banyak dari pekerja migran yang hanya bekerjapada pekerjaan kasar dibandingkan dengan bekerja pada sektor-sektor penting dan strategis di negara tersebut. Oleh karena itu TKI tidak mempunyai banyak pilihan dalam pekerjaan di luar negeri karena minimnya pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki.

Begitu juga dengan persoalan pendidikan menjadi kendala utama yang rata-rata tamat SD dan SMP. Tingkat pendidikan para TKI umumnya tidak sampai sarjana, lebih banyak tamatan SD, SMP dan SMA. Menurut BNP2TKI, dari angka penempatan TKI tahun 2014 sebanyak 429.872 orang yang lulusan SD sebanyak 138.821 orang (32,29 persen), lulusan SMP 162.731 orang (37,86 persen), lulusan SMU 106.830 orang (24,85 persen, lulusan Diploma

17.355 orang (4,04 persen), lulusan Sarjana 3.956 orang (0,92 persen), dan lulusan pascasarjana 179 orang (0,04 persen). Bahkan ada yang buta huruf tidak bisa membaca dan menulis, namun karena semangatnya luar biasa mencari rezeki dia berani berangkat ke luar negeri menjadi buruh migran. Pilihan pekerjaan mereka pada umumnya adalah pembantu rumah tangga bagi kaum migran perempuan, sedangkan laki-laki bekerja di daerah perkebunan kelapa sawit dan karet.

NTB menjadi salah satu daerah yang dikenal sebagai daerah distributor TKI terbesarkedua Indonesia setelah Jawa Timur yakni 46.187 orang per tahun. Mayoritas TKI adalah penduduk yang berdomisili di Lombok mencapai 44.500 orang, sisanya dari kepulauan Sumbawa 1000 orang. Lombok Timur, Tengah dan Utara mendistribusi TKI paling besar disebabkan tingginya tingkat kemiskinan di tiga daerah ini. Ini juga terlihat dari rendahnya IPM di Lombok Utara, Tengah dan Timur yang menempati ranking ke 10, 9 dan 8 dari 10 kabupaten di NTB. Tingginya sumbangan NTB dalam mendistribusikan

TKI ke luar negeri seharusnya menjadikan NTB menjadi daerah yang lebih maju karena pendapatannya jauh meningkat karena mendapatkan supply dana dari luar negeri yaitu para Tenaga kerja dari NTB, namun pada kenyataannya permasalahan muncul secara terus menerus baik dari tenaga kerja itu sendiri maupun dari keluarga yang ditinggal bekerja. Permasalahan utama adalah terkait dengan skill yang dimiliki oleh para TKI.

Tantangan terbesar yang dihadapi buruh migran adalah skill yang kurang tetapi semangat TKI yang ingin bekerja diluar negeri justru tinggi, meskipun pemerintah mencoba memfasilitasi para TKI tetapi tidak sedikit TKI lebih memilih bekerja dengan cara ilegal tanpa melalui prosedur pemerintah. Prosedur pemerintah dianggap terlalu sulit dan membatasi gerak para pekerja migran di luar negeri. Namun para TKI tidak menyadari dampak dari tindakannya. Munculnya pola-pola perbudakan dalam kegiatan bekerja menjadi salah satu dampak besar ketika para pekerja tidak dinaungi regulasi dari pemerintah Indonesia. Para pekerja harus bekerja diluar jam kerja bahkan melebihi batas jam kerja, dan hal-hal lain yang harus dikerjakan diluar pekerjaannya. Tidak jarang juga kondisi ini memicu konflik sosial yang tentu saja tidak berpihak kepada para TKI.

Selain itu juga pemahaman tentang kebudayaan dan nilai-nilai lokal tempat bekerja tidak kalah penting sebagai instrument untuk sosialisasi, adaptasi dan asimilasi budaya. Para buruh migran semestinya memiliki modal pengetahuan tentang tradisi dan kebudayaan lokal negara tempat mereka bekerja untuk meminimalisir kesalahpahaman dan meningkatkan rasa keberterimaan majikan. Mereka harus paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam adat dan kultur lokal daerah calon majikan. Begitu juga dengan penguasaan hukum yang berlaku di negara setempat harus dipahami dan dikuasai oleh calon buruh migran. Penting bagi mereka untuk mengetahui hak dan kewajibannya ditambah dengan kontrak kerja yang mereka tanda tangani. Sebagian besar buruh migran tidak memahami hak-hak dan kewajiban mereka termasuk besaran gaji yang akan diperoleh.

Permasalahan juga tidak selesai hanya sebatas dunia kerja di luar negeri. Para keluarga TKI juga memiliki problem sosial tersendiri di masyarakat, terutama bagi istri maupun anak-anak yang ditinggalkan. Tidak jarang muncul berita perselingkuhan istri maupun istri yang menikah lagi dengan laki-laki lain karena tidak sanggup hidup sendiri dengan mengasuh anak-anaknya. Selain itu juga pola kehidupan perkembangan anak yang hidup tanpa orang tua asuh baik bapak yang menjadi TKI ataupun ibu yang menjadi TKW menjadi permasalahan yang cukup urgent karena anak sangat membutuhkan kasih sayang langsung dari orang tuanya sendiri.

Berdasarkan kondisi tersebut maka saya mencoba merumuskan suatu penelitian untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan mengungkap dan mengeksplorasi kondisi para buruh migran Sasak terkait dengan upaya integrasi budaya mereka dengan budaya lokal komunitas Melayu di Malaysia, pola perbudakan yang terjadi di perusahaan-perusahaan di Malaysia, konflik sosial yang terjadi selama bekerja dan kehidupan keluarga di rumah termasuk istri dan anak-anak selama di tinggal merantai di tanah rantau.

Hasil dan Pembahasan

Kehidupan Pekerja Migran di Malaysia dan Persoalan-Persoakan yang Mereka Hadapi

Pergi merantau ke Malaysia adalah cita-cita sebagian besar masyarakat Sasak di Lombok untuk memperbaiki kualitas kehidupan ekonomi keluarganya. Tidak hanya orang dewasa yang berangkat ke Malaysia sebagai pekerja migran, tetapi juga anak-anak yang baru beranjak dewasa ikut ambil bagian. Berbagai motif yang melatarbelakangi mereka termasuk putus sekolah, tekanan orangtua untuk mencari uang, dan gelapnya masa depan di desa. Kepergian suku Sasak ke Malaysia dapat dilacak sejak masa pemerintahan Suharto di tahun 1980an, pada saat itu pemerintah Indonesia di bawah rezim Suharto menciptakan program transmigrasi dari daerah padat penduduk ke wilayah yang masih jarang penduduknya termasuk ke wilayah Kalimantan. Program ini secara tidak langsung mendorong dan menginspirasi masyarakat Sasak untuk keluar daerah ataupun keluar negeri seperti ke wilayah Malaysia.

Sebelum era Reformasi 1998, masyarakat Sasak hanya mengenal jalur laut ke Malaysia. Mereka berangkat melalui pelabuhan Lembar menuju Medan, Sulawesi, Batam, atau Kalimantan Utara kemudian ke Malaysia Timur dan Barat. Pesawat terbang pada waktu itu belum populer. Tiket ke Malaysia juga masih sangat murah. Seperti yang dijelaskan oleh Amaq Mawaddah (57 tahun) asal desa Paok Lombok yang berangkat 1994 dengan biaya hanya Rp. 325.000. Dia berangkat dari Lembar ke Dumai, dan terlantar selama tujuh bulan di sana. Sebanyak 1000 orang yang terlantar pada waktu itu yang tidak dapat makanan. Beruntung mereka ditampung di pertokoan yang sedang bangkrut dan pemilik tokoh membantu mereka. Dia dan teman-temannya sebanyak 30 pindah ke Riau dan harus menghadang truk yang sedang membawa beras dan mencuri beras sama-sama satu karung. Dia akhirnya pindah ke pulau Rupa Sumatera dan bertemu tekong yang lain dan akhirnya berangkat ke Malaysia dengan biaya Rp. 600.000.

Kepergian masyarakat Sasak ke Malaysia melahirkan banyak persoalan sosial yang mereka hadapi tidak hanya pada saat pemberangkatan, tetapi ketika mereka sampai ke Malaysia dan bekerjadi tempat itu. Isu tentang perbudakan, perbedaan kebudayaan, etos kerja dan perdagangan manusia merupakan sederet masalah yang mereka hadapi ketika di Malaysia. Persoalan-persoalan tersebut telah mengubah status mereka yang dulunya legal menjadi ilegal karena kondisi ini memaksa mereka untuk kabur keluar dari perusahaan. Pada saat yang bersamaan, dokumen-dokumen penting mereka dipegang oleh perusahaan sehingga mereka secara otomatis berstatus pekerja tanpa dokumen. Inilah yang menyebabkan para pekerja migran banyak yang ditangkap dan harus mengalami kehidupan penjara selama berbulan-bulan sebelum dideportasi ke Indonesia.

Pelarian mereka dari perusahaan juga memaksa para pekerja migran untuk tinggal di hutan selama bertahun-tahun. Mereka tinggal di dalam hutan dengan membangun pondok yang sederhana dan peralatan masak secara tradisional. Untuk mengunjungi mereka harus masuk ke hutan dengan jalur tertentu. Hanya orang tertentu yang memiliki akses ke tempat mereka karena sangat rawan jika mereka dilaporkan ke polisi. Pada waktu-waktu tertentu mereka dikejar oleh polisi dan harus siap siaga setiap malam tidur di persembunyian. Yang menarik adalah data lapangan menunjukkan bahwa mereka mendapat backingan dan perlindungan dari kepolisian Malaysia dengan membayar uang kepada mereka. Jadi, mereka aman dari kejaran polisi yang lain, atau setidaknya jika ada pemeriksaan oleh polisi mereka akan dikabari sebelumnya.

Tinggal di hutan penuh risiko termasuk isu kesehatan yang sering menimpa pekerja migran. Banyak di antara mereka yang terkena malaria dan berakhir dengan kematian. Mereka juga kesulitan untuk mengirim surat atau informasi ke keluarga terutama mereka yang sudah lanjut usia yang tidak bisa memegang handphone. Jika meninggal, maka mereka dikuburkan di dalam hutan karena teman-temannya tidak berani menginformasikan ke pemerintah maupun orang lain kecuali sesama pekerja migran. Persoalan besar juga dihadapi oleh pekerja migran perempuan Sasak yang terjebak pada penjualan manusia dan prostitusi. Karena terlantar dan tidak memiliki dokumen yang lengkap mereka sangat rentan dengan trafiking.

Pola Perbudakan dan Konflik Sosial Kelompok Buruh Migran

Kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh pekerja migran terkait dengan jalan ilegal dan tanpa dokumen seringkali membuat mereka terjebak pada perbudakan dan penjualan

manusia. Praktek perbudakan dalam dunia migrasi di Malaysia telah lama berjalan dan tidak banyak disadari oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Saya berargumen bahwa interseksionalitas telah menempatkan pekerja migran pada keterjebakan dalam berbagai masalah sosial termasuk perbudakan. Isu perbudakan memang jarang dibahas dalam literatur migrasi di Asia Tenggara, padahal perbudakan secara sistematis terjadi di beberapa tempat para buruh migrant bekerja khususnya mereka yang berangkat di bawah tahun 2000an.

Pola perbudakan yang terjadi di kalangan buruh migran adalah lepasnya tanggung jawab oleh tekong yang membawa mereka dari Lombok. Setelah berangkat dari Lombok, tekong tersebut tidak ikut berangkat ke Malaysia. Karena mereka tidak memiliki tujuan yang jelas, mereka seringkali terdampar di tengah jalan dan kehabisan uang. Ketika sampai di Malaysia mereka dipegang oleh tekong yang lain dan menyerahkan mereka ke perusahaan. Karena dibawa oleh tekong tersebut, maka perusahaan hanya membayar uang ke tekong itu, sedangkan mereka yang bekerja tidak mendapatkan apa-apa. Banyak di antara mereka tidak digaji sama sekali. Zaharullah (49 tahun) menyatakan,

“Saya melihat dan mengalaminya langsung perbudakaan itu, kita dipekerjakan seperti sapi. Kadang kita berantem sama mandor itu, tapi kalau saya tetap melakukan perlawanan, kalau teman yang lain ditendang sampai tidak bisa bangun dan sampai babak belur. Mereka melakukan pemukulan gara-gara kami mogok kerja karena mereka tidak pernah memberikankami gaji kemudian mereka membawa tukang pukul, ada teman saya juga giginya sampai copot.

Zaharullah juga menjelaskan pola perbudakan yang dihadapinya bahwa tekong yang membawa mereka mengambil uang dari perusahaan sehingga dia dan kawan-kawannya tidak mendapat gaji selama tiga tahun. Dia melakukan perlawanan, akan tetapi tidak memiliki pengaruh besar karena mereka tetap bekerja. Hampir tiga tahun dia tidak pernah memberikan kabar kepada orangtuanya yang pada waktu itu belum ada handphone, hanya bisa berkomunikasi lewat surat. Menurutnya, surat yang dia kirim tidak pernah sampai karena permainan perusahaan untuk melindungi perusahaan mereka dari intervensi luar akibat perbudakan tersebut. Surat-surat mereka sengaja tidak dikirim oleh perusahaan.

Pengalaman lain dialami oleh Mawaddah yang juga dijual oleh toke ke perusahaan, akan tetapi dia tetap memperoleh gaji meskipun kecil. Ketika bekerja di salah satu perusahaan sawit di Malaysia Barat dia memperoleh gaji 400 ringgit per bulan di tahun 1994. Selama tiga bulan bekerja panen sawit, dia kemudian pindah ke perusahaan lain karena gajinya kecil dan bekerjanya non stop full day. Dia kabur ke Terapi Satu, Pahang. Sampai di sana dia bekerja di abwah bos Ahwa, Kuantan dengan gaji 800 ringgit. Dia

kemudian pindah ke Tereng Gano bekerja untuk panen sawit, namun sayangnya dia tidak memperoleh gaji selama bekerja dan berusaha kabur kembali.

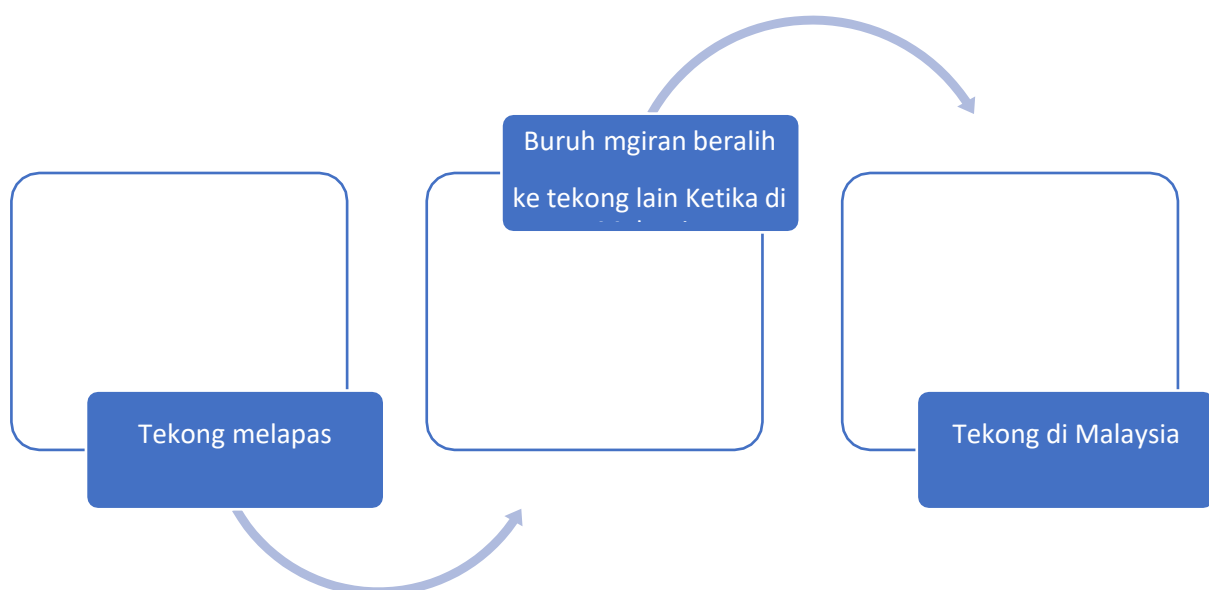
Fenomena kabur dari perusahaan karena faktor gaji dan ketidakpuasan pekerja migran merupakan masalah yang bersumber dari kesepakatan yang tidak jelas. Tidak adan transparansi di awal ketika mereka masuk bekerja karena permainan tekong kepada “toke” istilah bos untuk diperusahaan. Tekong mengambil persenan yang jauh lebih besar ketimbang gaji pekerja tanpa memberi penjelasan dari awal. Yang menjadi masalah adalah dokumen seperti paspor dipegang oleh perusahaan, dan ketika kabur mereka tidak membawa dokumen sama sekali sehingga rentan dengan penangkapan oleh aparat kepolisian.

Perbudakan tidak hanya terjadi setelah tiba dan bekerja di Malaysia, akan tetapi juga di tengah perjalanan di negara sendiri praktek perbudakan juga sangat rentan terjadi. Muzhiri (50 tahun) mengalami praktek perbudakan dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Setelah dipenjara selama 3 bulan di Pasar Nanas tahun 1993, dia dan teman-temannya sebanyak 800 orang dipulangkan ke Indonesia melalui jalur laut menggunakan perahu tanpa mesin. Perjalanan memakan waktu satu harisatu malam. Ketika di tengah laut itulah dia dan teman-temannya dijual sama tekong-tekong. Merekakerja menebang dan menarik kayu di daerah *balak* di desa Serapung, Sumatera menggunakan tali. Sebanyak 12 orang satu kelompok dan mereka digaji 300 ribu tapi semua gaji diambil sama tekong. Mereka sekedar dikasih makan di sana. Di sana mereka mengalami penyiksaan, lemah sedikit langsung di tendang sama mandor orang Batak. Selama tiga bulan mereka kerja paksa dan akhirnya berhasil kabur dari lingkungan perusahaan.

Praktek perbudakan juga dialami Saleh (60 tahun) asal Paok Lombok yang berangkat ke Malaysia di tahun 1999. Dia berangkat dari Lembar ke Selat Panjang Riau, dan di perbatasan Malaysia di ditangkap polisi Maalaysia dan dipulangkan. Dalam perjalanan pulang itulah dia dijual oleh tekong seharga 500 ribu ke perusahaan untuk bekerja menebang kayu dan menarik kayu. Tekongnya berjanji untuk memberi gaji 500 ribu perbulan, akan tetapi setiap gajian uang tersebut diambil dan tidak pernah diberikan kepada mereka. Selama dua bulan bekerja di tempat ini, akhirnya dia bisa keluar dan berangkat lagi ke Malaysia. Lalu Wajdi (47 tahun) mengamini praktek perbudakan di Pahang, Malaysia di tahun 1992 yang dikuasai oleh tekong. Tekong menjualnya ke perusahaan dengan harga 800 ringgit, akan tetapi yang diterima jauh lebih murah dari itu. Akhirnya di juga seriang pindah- pandang dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain.

Jika dilihat dari kasus di atas bahwa praktek perbudakan terjadi karena status ilegal para pekerja migran. Mereka sangat rentan dengan perbudakan dan penjualan manusia karena tidak memiliki dokumen. Hanya Sebagian kecil terjadi praktek perbudakan kepada tenaga kerja yang legal karena mereka dilindungi secara hukum. Hanya kasusisitis jika terjadi eksploitasi dan perbudakan tersebut pada kelompok pekerja migran legal. Seperti yang dijelaskan oleh Nurhasyidi (75 tahun) dan Mukdir (64 tahun) yang bekerja ke Malaysia di tahun 1990an dan 2000an tidak mengalami perbudakan dan kekerasan sosial di tempat mereka bekerja. Mereka cukup berhasil dan diperlakukan dengan baik oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Status legal menjadi pelindung buat mereka selama bekerja, dan memperoleh hak-haknya. Akan tetapi persoalan yang seringkali muncul adalah kebebasan mereka dalam memegang dokumen penting termasuk visa dan paspor mereka yang biasanya dikuasai oleh perusahaan sebagai jaminan untuk tetap bekerja sesuai dengan kontrak kerja. Status legal bisa berubah di tangan jalan menjadi ilegal. Fenomena perubahan status dari legal ke ilegal menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh pekerja migran, yang juga dapat dikatakan sebagai bagian dari pola perbudakan yang baru.

Berikut adalah pola perbudakan pekerja migran Indoensia di Malaysia,



Perbudakan memiliki dampak yang luar biasa pada pekerja migran. Selain menimbulkan konflik dan kekerasan antara pekerja migran dengan mandor, juga perbudakan menciptakan ruang prostitusi, kematian dan kriminalitas lainnya. Mawar (45 tahun), pekerja migran perempuan dari Lombok Tengah menceritakan pengalamannya terjebak dalam ruang prostitusi akibat tidak memiliki uang setelah kabur dari majikannya. Untuk bertahan hidup dia terpaksa melayani tamu-tamu dari kalangan elit baik etnis

China, India maupun Melayu. Profesi prostitusi tidak pernah terpikirkan di benaknya selama hidup di Lombok, apalagi dia dibesarkan pada tradisi keagamaan Islam yang kuat. Pada suatu malam, dia didatangi ibunya dalam mimpi dan memintanya untuk berhenti menjadi prostitut.

Perbudakan juga mengakibatkan banyaknya kematian yang tidak terdata karena aksi kekerasan oleh mandor kepada para pekerja yang dianggap budak. Ada yang dipukul dengan besi, dan ada juga pekerja migran yang giginya copot karena pukulan. Muzhiri menyaksikan temannya yang meninggal karena kelelahan setelah mengalami perbudakan selama dua bulan bekerja dipenebangan kayu liar di Sumatera karena terdampar.

Integrasikan dan Negosiasi Budaya mereka dengan budaya lokal Malaysia

Menurut E.B Tylor (1832-1917), budaya merupakan suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, adat istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Unsur budaya diantaranya yaitu bahasa, pengetahuan, sosial, peralatan hidup dan teknologi, mata pencaharian hidup, religi dan kesenian. Budaya yang tersebar di wilayah Asia Tenggara khususnya di Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan mengingat letak geografis wilayah yang cukup berdekatan sehingga masyarakat di kedua wilayah tersebut tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi.

Berdasarkan data di lapangan, warga negara Indonesia yang menjadi pekerja di Malaysia khususnya buruh migran yang berasal dari Lombok menyatakan adanya kecocokan antara budaya Indonesia dengan budaya Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari jawaban salah satu informan Mukdir (64 Tahun) yang mengatakan:

“kalau budaya ya bagus di sana, tidak jauh beda dengan di sini sama sama bersih orangsana”

Selain Mukdir, hal ini dibenarkan oleh informan lain Muzhiri (50 Tahun) dengan menyampaikan bahwa:

“kalau masalah budaya, sama saja di sini sama di sana mulai dari cara berpakaian, carakita beribadah juga sama saja, mereka juga merayakan hari besar mereka bagi yang Kristen.”

Zaharullah (49 Tahun) turut menyebut banyak kesamaan budaya baik di Indonesia maupun di Malaysia.

“ya mirip sudah budaya kita dengan mereka, kita mengerti bahasa mereka, keseniannya banyak yang saya suka di sana, kadang-kadang waktu tahun baru mereka mengadakan lomba lari karung, nyumpit, permainan lempar batu, main ban, banyak permainannya di sana.”

Berdasarkan hasil wawancara informan-informan tersebut, dapat disimpulkan bahwapara buruh migran Lombok, Indonesia merasa tidak ada perbedaan yang cukup berarti yang berkaitan dengan budaya baik di Indonesia maupun di Malaysia. Para buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi maupun mengintegrasikan kedua budaya Indonesia- Malaysia.

Kesamaan budaya antara kedua negara dapat dilihat dari berbagai hal mulai dari caraberpakaian yang sama, bahasa yang mirip sehingga mudah dimengerti oleh para buruh migran hingga berbagai macam permainan yang ada di Malaysia. Selain itu, tradisi keagamaan antar kedua negara juga memiliki kesamaan karena sebagian besar warga Malaysia menganut agama Islam seperti di Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri selain adanya beberapa kesamaan budaya antar Indonesia dan Malaysia, terdapat juga perbedaan sehingga adanya ketidakcocokan yang dialami oleh buruh migran, seperti adanya kebiasaan mengonsumsi minuman keras yang kerap terjadi di Malaysia. Hal ini disampaikan oleh H. Zaharullah (49 Tahun) yang menyatakan bahwa:

“kalau orang di sana kebiasaannya suka minum (mabok), kebudayaan asli orang sanajuga makan daging Babi. Kalau kita kan tidak makan”.

Hal ini juga dipertegas oleh informan Mawaddah (57 Tahun):

“yang saya tidak suka sama orang sana suka minum. Jadi teman-teman di sana ikutan. Tapi kalau saya tidak pernah”.

Kebiasaan mengonsumsi minuman keras merupakan kebiasaan yang sulit diterima oleh buruh migran khususnya masyarakat Lombok yang bekerja di Malaysia karena mereka tidak memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman keras seperti yang dilakukan oleh warga Malaysia. Hal ini menjadikan para buruh migran membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menerima kebiasaan mereka yang mengonsumsi minuman keras.

Kehidupan Sosial Keluarga TKI di Rumah Ketika Ditinggal Bekerja

Buruh migran yang bekerja di Malaysia tentu meninggalkan sanak keluarga di kampung halamannya. Mereka mengadu nasib di negeri orang dengan harapan agar dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, namun fakta

di lapangan berkata lain karena senyatanya keluarga yang ditinggalkan menghadapi berbagai masalah terutama masalah perekonomian yang tidak membaik usai ditinggalkan oleh keluarga yang bekerja sebagai buruh migran di Malaysia. Keluarga yang ditinggalkan terpaksa harus memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai buruh karena hasil yang diharapkan dari Malaysia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan Faizah (48 Tahun) yang menyatakan:

“di rumah saya jadi buruh cari upah di sawah orang, panen cabai, ngangkut kotoran sapi, kita diupah waktu itu dikasih beras 2 kg sama orang zaman itu. Kadang kalau kita panen cabai, kitadiupah 25 rupiah masa itu.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Rohmi (55 Tahun) menyampaikan bahwa:

“kehidupan kita susah sekali waktu itu, musim pedih lah. Saya pergi bekerja ke Ketangga dulu, saya kerja di sawah ibu saya. Di sana sudah tempat kita cari makan. Saya dah yang nyari uang dulu, saya dapat uang dari sawah dengan menjadi buruh.”

Informan lain Nurhidayati (54 Tahun) juga menyebut bahwa kehidupan saat ditinggal merantau ke Malaysia cukup sulit karena uang yang dikirimkan tidak mencukupi biaya kehidupan sehari-hari.

“dia tetap mengirim uang, tapi sambil itu saya mencari upah di sawah orang untuk tambahan biaya sehari-hari.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kehidupan keluarga TKI yang ditinggalkan dapat dikatakan masih jauh dari kata cukup. Beberapa dari keluarga yang ditinggalkan bekerja sebagai buruh di sawah untuk menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari disamping menunggu uang kiriman dari suami. Sebagian juga bekerja sebagai buruh untuk memenuhi kebutuhan karena tidak mendapat kiriman uang dari suami yang bekerja di Malaysia.

Informan Hj. Halimah (55 Tahun) megatakan:

“ya kalo kehidupan kita susah sudah, namanya juga kita ditinggalkan kita cari uang sendiri. Saya di Pancor jadi tukang masak orang asrama, 300 ribu sebulan, itu sudah jadi biaya hidup kita. Saya tidak pernah saling hubungi selama 7 tahun, surat tidak ada teleponan juga tidak adapokonya hilang sudah waktu itu.”

Faizah (48 Tahun) juga mengaku bahwa ia sama sekali tidak mendapat kabar maupun kirimang uang dari suami selama bertahun-tahun.

“saya tidak pernah saling hubungi selama 3 tahun, waktu suami saya berangkat, saya sedang hamil, pokoknya suami saya bisa dikatakan hilang sudah. Ya mau gimana lagi, kita tidak tau kemana kita melapor masa itu.



Kita tinggal pasrah dan berdoa agar suami saya selamat di negara orang. Waktu itu saya selalu gelisah, untungnya saya tinggal bersama ibu saya dulu, jadi saya sedikit tenang.”

Selain permasalahan ekonomi, keluarga yang ditinggalkan juga memiliki masalah terkait kesulitan komunikasi dengan suami karena terbatasnya alat komunikasi pada masa itu, bahkan beberapa informan mengatakan bahwa suaminya hilang di Malaysia karena tidak ada kabar selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa risiko buruh migran yang berangkat ke Malaysia melalui jalur ilegal tidak hanya berdampak pada buruh migran itu sendiri, tetapi juga pada keluarga yang ditinggalkan. Peristiwa ini dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat ke depannya untuk lebih mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan apabila hendak bekerja di Malaysia melalui jalur ilegal.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, S. (2007). *Policy Brief on Bilateral Labor Agreement of Indonesian*. Institute for National and Democratic Studies (INDIES) Indonesia 1–12.
- Asriani, D.D dan Amalia, E. (2014). Jejak Perempuan Buruh Migran dalam Masyarakat ASEAN 2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2), 147-159.
- Azmy, A.S. (2012). *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono 2004-2010*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bal, C.S, dan Gerard, K. (2017). ASEAN's governance of migrant worker rights. *Third World Quarterly*, <https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1387478>.
- BPS NTB. (2018). *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2018*. Pemprop NTB. BPS NTB. (2015). *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2015*. Pemprop NTB.
- Chin, C.B.N. (1997). Walls of Silence and Late Twentieth Century Representations of the Foreign Female Domestic Worker: The Case of Filipina and Indonesian Female Servants in Malaysia. *IMR*, 31(2), 353–385.
- Constable, N. (2009). Migrant Workers and the Many States of Protest in Hong Kong. *Critical Asian Studies*. 41(1) 143–164., <https://doi.org/10.1080/14672710802631202>
- Grant Human Rights Watch, (2004). Help Wanted : Abuses against Female Migrant Domestic Workers in Indonesia and Malaysia. *Human Rights Watch*, 16(9).
- Greenwood, M. J., & Hunt, G. L. (2003). The Early History of Migration Research. *International Regional Science Review*, 26(1), <https://doi.org/10.1177/0160017602238983>
- Hakim, L, Fitrianto, A. (2015). Political Economy of Sending Domestic Workers Abroad: Case Study of Indonesian Migrant Workers. *Mediterranean Journal of Social Science*, 6(4).
- Haryani, R. N., Indonesia, D., & Buruh, D. (2011). Tinjauan Kriminologi Kritis terhadap Kebijakan Negara dalam Melindungi Perempuan Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. 7(2), 174-192.
- Hermawan, Y.P dkk. (2014). *Identifikasi Potensi Perempuan dalam Upaya Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia*. Laporan Hasil Penelitian: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan.
- Karim, M. F. (2017). Institutional Dynamics of Regulatory Actors in the Recruitment of Migrant Workers. *Asian Journal of Social Science*, 45, 440–464. <https://doi.org/10.1163/15685314-04504004>
- Kaur, A. (2009). Labor Crossings in Southeast Asia : Linking Historical and Contemporary Labor Migration. *New Zealand Journal of Asian Studies*. 11 (1), 276–303.
- Kaur, A. (2014). *Mobility, Labour Mobilisation And Border Controls: Indonesian Labour Migration To Malaysia Since 1900*. Paper ini dipresentasikan pada seminar "15th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia" di Canberra 29 June-2 July 2004.
- Killias, O. (2010). 'Illegal' Migration as Resistance: Legality, Morality and Coercion in Indonesian Domestic Worker Migration to Malaysia. *Asian Journal of Social Science*, 38, 897–914, <https://doi.org/10.1163/156853110X530796>



- Larsen, J. J. (2010). Migration and people trafficking in southeast Asia. *Trends & issues in Crime and Criminal Justice*. 401.
- M Setiadi, Elly. (2012). Ilmu Sosial Budaya Dasar Jakarta: Kencana, 28.
- Maksum, A., dan Surwandono. (2017). Suffer to Survive : The Indonesian Illegal Workers Experiences in Malaysia and Japan. *Journal of Social Research & Policy*, 8(1), 1-23.
- Melchert, P. (2017). Indonesian Migrants in Taiwan: Religion and Life-style. *Arbeitspapiere zur Ethnologie, Working Papers in Social Anthropology*, (4)
- Pels, P. (1997). The Anthropology of Colonialism: Culture, History, and the Emergence of Western Governmentality. *Annual Reviews of An Anthropology*, 26, 163-183.
- Putra, P. (2019). Strategi dan Informasi Transmigrasi pada Masa Orde Baru dalam Rangka Mensukseskan Program Pembangunan Nasional. *Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca*, 35 (2), 1–15.
- Rahman, M., dan Fee, L. K. (2009). *Indonesian Domestic Workers in HongKong, Singapore and Malaysia*. 5(2).<https://doi.org/10.1080/17441730902992059>
- Rahmat, A. et al. (2018). Dari Imigrasi Menuju Integrasi: Peranan Etnis Jawa Dalam Politik Di Suriname (1991- 2015). *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 7(1).<https://doi.org/10.17509/factum.v7i1.11923>
- Rother, S. & Rother, S. (2017). Indonesian migrant domestic workers in transnational political spaces : agency , gender roles and social class formation formation. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2016.1274567>
- Sakdapolrak, P. (2002). *Ringkasan Eksekutif Perlindungan BuruhMigran Perempuan:Kebijakan di Negara-negara Pengirim dan Penerima*, Jakarta: Internship in IDF
- Scott, D. (1992). Anthropology and Colonial Discourse: Aspects of the Demonological Construction of Sinhala Cultural Practice. *Cultural Anthropology*, 7(3), 301–326. <https://doi.org/10.1525/can.1992.7.3.02a00020>
- Silvey, R. (2004). Transnational Migration And The Gender Politics OfScale : Indonesian Domestic Workers In Saudi Arabia. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 25(2),2004, 141-155.
- Silvey, R. (2007). Mobilizing Piety : Gendered Morality and Indonesian -Saudi Transnational Migration. *Mobilities*, 2 (2), 219–229, DOI: 10.1080/17450100701381565 .
- Sulistiyo, P.A., dan Wahyuni, E.S (2012). Buruh Migran Perempuan Dalam Rumahtangga. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 06(03), 252–258.
- Surtees, R. (2003). Female Migration and Trafficking in Women : The Indonesian context. *Development* 46(3), 99–106.
- Susanti, S. (2016). Nasionalisme Dan Gerakan Mulih Njowo, 1947 Dan1954. *Jurnal SejarahCitra Lekha*, 1(2), <https://doi.org/10.14710/jscl.v1i2.12767>
- Wickramasekera, P. (2002). Asian Labour Migration: Issues and Challenges in an Era of Globalization. *Laporan dan Kesimulan:ILO Asia-Pacific Regional Symposium for Trade Union Organizations on Migrant Workers, 6-8 December 1999, Kuala Lumpur, Malaysia, ILO. Bangkok, International Labour Office:Bureau of Workers Activities*.